Andromeda : Jurnal Manajemen dan Bisnis Syariah
Vol. 3, No. 1, June 2025, pp. 208-217
E-ISSN : **3026-6750** P-ISSN : **3089-543X**
DOI : **https://doi.org/10.24260/andromeda.v3i1.5043**

OPTIMALISASI PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT: STUDI KASUS PADA SEKTOR UNGGULAN DAERAH

[1]Syarif Rachmadyana
[1]Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak, Indonesia
Email: syariframa848@gmail.com

Received : 19-09-2025 Revised : 22-09-2025 Accepted : 22-09-2025

CC BY 4.0 Attribution 4.0 International
Copyright © 2025 Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Kalimantan Barat serta kesesuaiannya dengan rencana pengembangan sektor unggulan daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam dan *focus group discussion* (FGD) dengan informan dari unsur pemerintah, manajer CSR perusahaan, dan perwakilan masyarakat lokal. Data dianalisis secara tematik dengan pendekatan teori stakeholder, teori legitimasi, dan triple bottom line

Penelitian menemukan bahwa program CSR di Kalimantan Barat masih terfragmentasi, bersifat filantropis, dan belum terintegrasi dengan prioritas pembangunan daerah. Terdapat kelemahan koordinasi antarpemangku kepentingan, minimnya partisipasi publik, serta ketiadaan sistem monitoring digital terintegrasi. Namun demikian, terdapat peluang untuk mensinergikan CSR dengan sektor unggulan (perkebunan, pariwisata, industri kreatif, dan UMKM) guna mempercepat pembangunan daerah berkelanjutan.

Penelitian ini menawarkan model konseptual integrasi CSR dalam pembangunan daerah melalui pendekatan sektor unggulan dan inovasi digital, yang masih jarang dikaji di konteks Indonesia.

Kata kunci: *Tanggung jawab sosial perusahaan, pembangunan sektor unggulan, teori pemangku kepentingan, teori legitimasi, triple bottom line*

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) in West Kalimantan and its alignment with the regional leading sector development plan. A descriptive qualitative method was employed through in-depth interviews and focus group discussions (FGDs) with informants from government representatives, corporate CSR managers, and local community representatives. Data were thematically analyzed using stakeholder theory, legitimacy theory, and the triple bottom line approach.

The study found that CSR programs in West Kalimantan remain fragmented, philanthropic in nature, and not yet integrated with regional development priorities. Weak coordination among stakeholders, limited public participation, and the absence of an integrated digital monitoring system were identified as major challenges. Nevertheless, opportunities exist to synergize CSR with leading sectors (plantations, tourism, creative industries, and MSMEs) to accelerate sustainable regional development.

This research offers a conceptual model of CSR integration into regional development through a leading sector approach and digital innovation, which remains underexplored in the Indonesian context.

Keywords: *corporate social responsibility, leading sector development, stakeholder theory, legitimacy theory, triple bottom line*

A. PENDAHULUAN

Corporate Social Responsibility (CSR) secara global telah berevolusi menjadi instrumen penting dalam pembangunan berkelanjutan. Bukan lagi sebatas kewajiban hukum atau filantropi, CSR kini berperan strategis dalam menciptakan nilai bersama (*shared value*) antara perusahaan, masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Teori stakeholder menegaskan tanggung jawab perusahaan terhadap semua pihak terkait, sementara legitimacy theory melihat CSR sebagai sarana memperoleh pengakuan sosial. Kerangka triple bottom line (Elkington, 1997) bahkan menekankan bahwa tanggung jawab perusahaan harus mencakup aspek profit, people, dan planet. Dalam tata kelola yang ideal, CSR berpotensi mendukung agenda pembangunan daerah secara langsung melalui sinergi dengan pemerintah provinsi.

Di tingkat nasional, tren CSR terus berkembang. Berdasarkan BISRA 2023, CSR telah diidentifikasi sebagai solusi alternatif pendanaan pembangunan nasional, sejalan dengan prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang menargetkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penguatan ketahanan lingkungan hidup, bencana, dan perubahan iklim Bisnis.com. Di sektor korporasi, pemerintah telah menerbitkan Permen BUMN No. PER-1/MBU/01/2023 yang memperkuat arah CSR BUMN ke dalam empat pilar pembangunan: ekonomi, sosial, lingkungan, serta tata kelola dan hukum Pos IndonesiaBUMN Track | Berita BUMN Terbaru.

Secara lokal, fenomena CSR di Kalimantan Barat menunjukkan:data Bappeda Kalbar mencatat bahwa kontribusi sektor perkebunan menyumbang lebih dari 80 persen dari total CSR provinsi, sementara sektor unggulan lainnya seperti pariwisata, pertanian, dan industri kreatif masih minim menerima dukungan CSR. Praktik CSR lokal juga cenderung reaktif terhadap kondisi krisis seperti bencana dan kenaikan harga BBM, bukan sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka panjang.

Gap ini menegaskan bahwa meskipun teori CSR telah berkembang secara global dan regulasi di tingkat nasional makin mendukung penelitian yang secara sistematis menelaah integrasi CSR dengan prioritas pembangunan daerah di Kalimantan Barat masih sangat terbatas. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena secara eksplisit mengeksplorasi keterpaduan CSR dengan pembangunan sektor unggulan daerah, serta menyusun kerangka analitis yang menggabungkan teori CSR klasik dengan konteks nyata Kalbar.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana optimalisasi CSR dapat diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan pemerintah provinsi dengan fokus pada sektor unggulan daerah. Penelitian ini juga menguji sejauh mana CSR yang terintegrasi dengan agenda pembangunan daerah dapat memperkuat daya saing lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan.

Corporate Social Responsibility (CSR) dipahami sebagai kewajiban perusahaan untuk memberikan kontribusi di luar kepentingan ekonomi semata, meliputi aspek sosial dan lingkungan. Teori stakeholder (Freeman, 1984) menekankan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab pada semua pihak yang terlibat, bukan hanya pemegang saham. Teori

legitimasi (Suchman, 1995) menegaskan pentingnya pengakuan masyarakat agar perusahaan memperoleh keberlangsungan operasional. Selanjutnya, konsep triple bottom line (Elkington, 1997) menjadi kerangka komprehensif yang menekankan keseimbangan antara profit, people, dan planet.

Perkembangan terbaru menegaskan pentingnya melihat CSR bukan sekadar legitimasi, melainkan instrumen pembangunan berkelanjutan. Gertze & Petersen (2024) menunjukkan bahwa CSR di negara berkembang efektif mendorong pembangunan berkelanjutan jika dikaitkan langsung dengan prioritas sektor lokal. Offiong et al. (2023) menambahkan bahwa inovasi CSR yang berbasis digitalisasi mampu meningkatkan transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas. Dalam konteks Indonesia, studi terkini (Rahmawati & Putra, 2023; Sari, 2022) menyoroti perlunya sinkronisasi CSR dengan agenda pembangunan daerah agar tidak terjebak pada kegiatan filantropis jangka pendek. Dengan demikian, penelitian ini memperluas cakupan teoretis CSR dari sekadar tanggung jawab sosial menuju integrasi strategis dengan pembangunan daerah.

Penelitian mengenai Corporate Social Responsibility (CSR) telah dilakukan dalam berbagai konteks, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek legitimasi dan tanggung jawab sosial perusahaan, bukan pada integrasi CSR ke dalam agenda pembangunan daerah. Studi klasik seperti Freeman (1984), Suchman (1995), dan Elkington (1997) membangun fondasi konseptual CSR melalui teori stakeholder, legitimacy, dan triple bottom line. Ketiganya menegaskan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab pada pemangku kepentingan, perlu memperoleh pengakuan sosial, dan harus menyeimbangkan tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Meskipun penting secara konseptual, studi-studi ini tidak membahas implementasi CSR dalam konteks pembangunan daerah atau sektor unggulan secara spesifik.

Studi yang lebih mutakhir mulai menekankan perlunya CSR beradaptasi dengan kebutuhan lokal. Jamali dan Karam (2018) menekankan bahwa efektivitas CSR bergantung pada relevansinya dengan konteks sosial-budaya setempat. Di Indonesia, Sari (2022) juga menemukan bahwa CSR yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat lokal lebih diterima dibanding pendekatan filantropis semata. Namun, kedua studi tersebut belum menyoroti sektor unggulan spesifik sebagai fokus pembangunan daerah.

Beberapa studi lain mulai mengaitkan CSR dengan agenda pembangunan daerah. Pratama dan Fitriani (2022) menemukan bahwa sinergi CSR dan pemerintah daerah mampu mempercepat pencapaian target pembangunan, sementara Rahmawati dan Putra (2023) menunjukkan bahwa CSR dapat mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Namun, fokus keduanya masih umum dan belum diarahkan pada sektor prioritas daerah tertentu.

Studi Offiong et al. (2023) memperkenalkan dimensi inovasi digital dalam pelaksanaan CSR yang meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat, tetapi konteksnya terbatas pada Afrika dan tidak membahas keterkaitan dengan sektor unggulan. Sementara itu, Gertze & Petersen (2024) menegaskan bahwa CSR dapat mendorong

pembangunan sektor lokal di negara berkembang, tetapi belum ada studi yang meneliti kasus Kalimantan Barat secara spesifik

B. METODE

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan dukungan data kuantitatif untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai optimalisasi program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam mendukung prioritas pembangunan pemerintah provinsi. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami fenomena CSR tidak hanya dari sisi angka atau realisasi dana, tetapi juga dari aspek proses, persepsi, dan dampaknya terhadap masyarakat serta sektor unggulan daerah.

2.2 Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan melalui kombinasi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah provinsi yang terkait dengan perencanaan pembangunan, manajer CSR perusahaan, serta tokoh masyarakat penerima manfaat program CSR. Selain itu, dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan perwakilan pemangku kepentingan untuk menggali pandangan mereka mengenai sinkronisasi program CSR dengan prioritas pembangunan daerah. Data sekunder dikumpulkan dari laporan CSR perusahaan, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), laporan Bappeda, serta publikasi resmi dari pemerintah provinsi dan kementerian terkait.

Metode pengambilan sampel dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan keterwakilan perusahaan dari sektor unggulan yang dominan di Kalimantan Barat, terutama sektor perkebunan, pertanian, pariwisata, dan industri kreatif. Pemilihan informan kunci mempertimbangkan keterlibatan langsung mereka dalam perencanaan maupun implementasi CSR, sehingga data yang diperoleh relevan dengan fokus penelitian.

Tabel 1 Operasional Informan Penelitian

Kategori Informan	**Contoh Informan**	**Jumlah/Teknik Pemilihan**	**Fokus Informasi yang Digali**
Pemerintah Provinsi	1. Pejabat Bappeda Kalbar 2. Dinas Perkebunan 3. Dinas Pertanian 4. Dinas Pariwisata 5. Dinas Lingkungan Hidup	Purposive (2–3 orang per dinas terkait)	Kebijakan pembangunan daerah, prioritas sektor unggulan, sinkronisasi CSR dengan RPJMD/RKPD.
Perusahaan Pelaksana CSR	1. Manajer CSR / PR perusahaan perkebunan, pertambangan, pariwisata, industri kreatif.	Purposive (5–7 perusahaan utama di Kalbar)	Strategi dan praktik CSR, mekanisme kolaborasi dengan pemerintah, tantangan implementasi.

	2. Perusahaan penerima CSR Award		
Masyarakat Penerima Manfaat	1. Tokoh masyarakat desa 2. Kelompok tani, nelayan, UMKM, komunitas pariwisata 3. Lembaga pendidikan/ kesehatan penerima CSR	Snowball Sampling (±10–15 orang)	Dampak CSR terhadap kesejahteraan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan kualitas lingkungan.
Akademisi/LSM (opsional, triangulasi)	1. Akademisi di bidang CSR dan pembangunan daerah 2. LSM pendamping masyarakat lokal	Purposive (2–3 orang)	Perspektif independen tentang efektivitas CSR, tantangan implementasi, keberlanjutan program.

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, digunakan beberapa teknik validitas sesuai standar penelitian kualitatif. Pertama, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, yaitu pemerintah provinsi, pihak perusahaan, masyarakat penerima manfaat, serta akademisi atau LSM. Dengan cara ini, data yang diperoleh dapat diverifikasi dari berbagai sudut pandang sehingga lebih objektif dan komprehensif.

Kedua, triangulasi metode dilakukan dengan mengombinasikan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, *Focus Group Discussion* (FGD), dan analisis dokumen. Data dari wawancara diverifikasi dengan hasil FGD serta diperkuat melalui dokumen sekunder seperti laporan CSR perusahaan dan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Ketiga, member check diterapkan dengan meminta konfirmasi kembali kepada beberapa informan kunci mengenai ringkasan hasil wawancara atau FGD. Langkah ini bertujuan memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan maksud sebenarnya dari informan.

Keempat, peer debriefing dilakukan dengan melibatkan akademisi sejawat atau pakar CSR dalam mereview hasil sementara penelitian. Dengan demikian, interpretasi peneliti dapat diuji secara kritis oleh pihak eksternal yang kompeten.

Dengan menerapkan teknik-teknik tersebut, data yang dihasilkan dalam penelitian ini diharapkan memiliki validitas tinggi, sehingga kesimpulan yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan baik secara akademis maupun praktis.

Instrumen penelitian berupa panduan wawancara semi-terstruktur yang dikembangkan berdasarkan indikator dalam teori stakeholder, teori legitimasi, dan kerangka triple bottom line. Panduan wawancara ini difokuskan pada beberapa aspek, antara lain strategi perusahaan dalam merancang program CSR, mekanisme sinkronisasi dengan agenda pembangunan daerah, serta persepsi masyarakat mengenai dampak program CSR terhadap peningkatan kesejahteraan dan daya saing sektor unggulan.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis tematik, di mana data yang diperoleh dari wawancara dan FGD dikategorikan ke dalam tema-tema utama yang relevan dengan kerangka teoritis penelitian. Data kuantitatif dari laporan CSR perusahaan dan dokumen pemerintah digunakan sebagai bahan triangulasi untuk memperkuat validitas hasil penelitian. Model penelitian yang digunakan menempatkan CSR sebagai variabel independen yang memengaruhi pencapaian prioritas pembangunan pemerintah provinsi melalui penguatan sektor unggulan daerah. Dalam model ini, pembangunan berkelanjutan dipandang sebagai outcome yang diukur dari dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman mendalam mengenai bagaimana CSR dapat dioptimalkan sebagai instrumen strategis pembangunan daerah, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah provinsi dan perusahaan dalam menyelaraskan program CSR dengan agenda pembangunan jangka panjang.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Implementasi CSR di Kalimantan Barat

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui wawancara mendalam, forum group discussion (FGD), dan analisis dokumen, diperoleh gambaran bahwa implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Kalimantan Barat masih terpusat pada sektor perkebunan. Laporan Bappeda Kalimantan Barat tahun 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 80% total dana CSR di provinsi ini berasal dari perusahaan perkebunan kelapa sawit. Sektor lain seperti pariwisata, pertanian, dan industri kreatif hanya menerima alokasi CSR dalam porsi kecil dan bersifat sporadis. Selain itu, sebagian besar program CSR perusahaan masih bersifat filantropis jangka pendek, seperti bantuan sembako, santunan bencana, serta dukungan terhadap infrastruktur dasar desa. Program CSR yang bersifat produktif atau berorientasi pada pemberdayaan sektor unggulan lokal masih sangat terbatas. Beberapa perusahaan telah mencoba merancang program pelatihan UMKM dan pengembangan destinasi wisata desa, namun jumlahnya masih kecil dan belum terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti RPJMD maupun RKPD.

2. Temuan Utama dari Wawancara dan FGD

Hasil wawancara dengan pejabat Bappeda, Dinas Perkebunan, Dinas Pariwisata, serta manajer CSR perusahaan, diikuti FGD multipihak, mengungkap empat tema utama terkait tantangan sinkronisasi CSR dengan pembangunan daerah.

Tabel 2. Hasil Analisis Tematik CSR di Kalimantan Barat

Tema Utama	**Subtema**	**Kutipan Representatif**	**Sumber Informan**
Orientasi CSR masih jangka pendek	1. Filantropi dominan	"Sebagian besar CSR kami masih bersifat bantuan tanggap darurat, belum ada	Manajer CSR Perusahaan Sawit

	2. Reaktif terhadap krisis	arahan untuk program jangka panjang.”	(Wawancara)
Belum ada mekanisme sinkronisasi CSR	1. Tidak terhubung ke RPJMD 2. Minim koordinasi lintas sektor	“Kami tidak punya platform untuk mengkoordinasikan CSR perusahaan dengan program pemerintah daerah.”	Pejabat Bappeda Kalbar (Wawancara)
Potensi CSR mendukung sektor unggulan	1. Dukungan terbatas ke UMKM, pariwisata 2. Antusiasme kolaborasi tinggi	“Perusahaan kami tertarik mendukung pariwisata desa, tapi kami tidak tahu skema kolaborasinya harus seperti apa.”	FGD Perusahaan & Dinas Pariwisata
Kebutuhan inovasi digital CSR	1. Pelaporan tidak transparan 2. Data tidak terintegrasi	“Seandainya ada dashboard bersama untuk memantau CSR, kami bisa pastikan programnya tepat sasaran.”	Dinas Lingkungan Hidup (FGD)

3. Diskusi: Analisis Temuan Berdasarkan Kerangka Teoritis

Temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan praktik CSR di Kalimantan Barat. Analisis melalui tiga pendekatan teori utama menunjukkan bahwa:

a. Teori Stakeholder. Implementasi CSR saat ini masih dominan diarahkan kepada komunitas terdekat perusahaan (community-based) dan belum menjangkau pemangku kepentingan strategis seperti pemerintah daerah, pelaku UMKM, dan sektor pariwisata. Hal ini menunjukkan bahwa stakeholder mapping belum dilakukan secara komprehensif. Implementasi CSR yang lebih strategis memerlukan keterlibatan lintas pemangku kepentingan sejak tahap perencanaan, bukan hanya pelaksanaan.
b. Teori Legitimasi. CSR yang bersifat reaktif dan filantropis hanya mampu memberikan legitimasi jangka pendek berupa citra positif perusahaan, namun tidak menciptakan legitimasi jangka panjang berbasis kontribusi nyata terhadap pembangunan. Legitimasi berkelanjutan hanya dapat diperoleh apabila perusahaan membuktikan kontribusinya terhadap target pembangunan daerah yang diakui publik dan tertuang dalam RPJMD/RKPD.
c. Triple Bottom Line (TBL). Praktik CSR saat ini cenderung menitikberatkan pada dimensi people (bantuan sosial) dan kurang memperhatikan dimensi profit (penguatan

ekonomi lokal) dan planet (pengelolaan lingkungan). Padahal, integrasi ketiga dimensi TBL diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program CSR dan efek multiplikatif pada pembangunan daerah.

Selain itu, hasil FGD menegaskan perlunya inovasi digital CSR untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi multipihak. Gagasan ini sejalan dengan Offiong et al. (2023) yang menekankan bahwa digitalisasi dapat menjadi pengungkit partisipasi publik dalam CSR. Namun dalam konteks Kalimantan Barat, digitalisasi CSR belum berjalan sama sekali karena belum ada platform bersama yang menghubungkan data CSR perusahaan dengan prioritas pembangunan daerah.

4. Sintesis Temuan: Model Optimalisasi CSR untuk Pembangunan Sektor Unggulan

Berdasarkan seluruh temuan, penelitian ini menyusun model konseptual sebagai berikut:

CSR Terintegrasi → Sinkronisasi Perencanaan → Dukungan Sektor Unggulan (Perkebunan, Pariwisata, UMKM, Industri Kreatif) → Pembangunan Daerah Berkelanjutan, dengan inovasi digital CSR sebagai pengungkit utama (enabler) untuk meningkatkan transparansi, partisipasi, dan efektivitas program.

Model ini menunjukkan bahwa CSR tidak cukup hanya dikelola secara individual oleh perusahaan, tetapi perlu dilembagakan dalam sistem pembangunan daerah, misalnya melalui platform bersama yang menghubungkan program CSR dengan RPJMD provinsi

5. Analisis CSR Berdasarkan Sektor

a. Sektor Perkebunan. Sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit, menjadi penyumbang terbesar dana CSR (lebih dari 80%). Program umumnya berupa bantuan sosial, infrastruktur dasar, dan dukungan kesehatan dan pendidikan. Meskipun memberi dampak langsung, program masih bersifat filantropis jangka pendek, belum fokus pada pemberdayaan petani plasma atau peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat (Wibisono, 2020).
b. Sektor Pariwisata. Program CSR pada sektor pariwisata masih sangat terbatas, padahal Kalimantan Barat memiliki potensi wisata alam dan budaya yang besar. Hanya sebagian kecil perusahaan yang menyalurkan CSR untuk mendukung promosi atau fasilitas wisata berbasis komunitas. Hal ini menunjukkan kesenjangan antara potensi pariwisata dan dukungan CSR (Jamali & Karam, 2018).
c. Sektor UMKM dan Industri Kreatif. Dukungan CSR pada sektor UMKM dan industri kreatif masih minim. Beberapa inisiatif pelatihan kewirausahaan dan bantuan modal memang ada, tetapi belum terintegrasi dalam kerangka pembangunan ekonomi daerah. Padahal sektor ini berpotensi menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing lokal (Pratama & Fitriani, 2022).
d. Bidang Lingkungan Hidup. Program CSR lingkungan umumnya berupa rehabilitasi pascabencana, penghijauan, dan pengelolaan limbah. Namun pelaksanaannya masih

sporadis dan lebih bersifat responsif daripada preventif. Ini sejalan dengan Elkington (1997) bahwa dimensi lingkungan sering kali menjadi yang paling lemah dalam implementasi CSR, padahal krusial bagi keberlanjutan.

D. KESIMPULAN

1. Kesimpulan

   Penelitian ini menemukan bahwa implementasi CSR di Kalimantan Barat masih terfokus pada sektor perkebunan dengan pola kegiatan filantropis jangka pendek. Meskipun memberi manfaat langsung, kontribusi CSR terhadap sektor unggulan lain seperti pariwisata, UMKM, dan industri kreatif masih terbatas. Kondisi ini menegaskan adanya kesenjangan antara kerangka teoritis CSR yang menekankan pembangunan berkelanjutan dengan praktik di lapangan.

2. Saran

   Berdasarkan kesimpulan di atas, maka Optimalisasi CSR dapat dilakukan melalui:

   1. Penyusunan regulasi daerah yang lebih terarah dan terukur.
   2. Transformasi paradigma perusahaan dari charity menuju creating shared value (CSV).
   3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan program CSR.

   Dengan langkah tersebut, CSR diharapkan dapat menjadi instrumen pembangunan daerah yang berkelanjutan dan mampu memperkuat sektor unggulan.

Implikasi Penelitian

1. Implikasi Teoritis.

   Penelitian ini memperkaya literatur CSR dengan menekankan posisinya sebagai instrumen pembangunan daerah, bukan sekadar strategi legitimasi perusahaan. Integrasi antara stakeholder theory, legitimacy theory, dan triple bottom line dalam konteks pembangunan daerah memberikan kontribusi konseptual baru, khususnya pada literatur CSR di negara berkembang.

2. Implikasi Empiris.

   Studi kasus di Kalimantan Barat memberikan gambaran nyata tentang praktik CSR yang masih didominasi kegiatan filantropis. Temuan ini dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya untuk menguji efektivitas CSR yang terintegrasi dengan prioritas pembangunan sektor unggulan, serta menegaskan pentingnya kolaborasi multi pihak.

3. Implikasi Praktis.

   Bagi pemerintah daerah, diperlukan regulasi CSR yang lebih sinergis dengan RPJMD/RKPD. Bagi perusahaan, perlu pergeseran fokus CSR dari filantropi menuju pemberdayaan masyarakat yang berorientasi keberlanjutan. Bagi masyarakat, penting untuk meningkatkan partisipasi aktif agar program CSR benar-benar menjawab kebutuhan lokal.

REFERENSI

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Barat. (2023). Laporan evaluasi pelaksanaan CSR di Kalimantan Barat. Pontianak: Bappeda Provinsi Kalbar.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN). (2023). Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/01/2023 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Jakarta: Kementerian BUMN.

Badan Usaha Milik Negara Track. (2023). Berita BUMN terbaru dan isu CSR. Diakses dari https://www.bumntrack.co.id

Bisnis.com. (2023). CSR diidentifikasi sebagai solusi alternatif pendanaan pembangunan nasional. Diakses dari https://www.bisnis.com

BISRA (Business Indonesia Social Responsibility Award). (2023). Laporan tahunan CSR Indonesia 2023. Jakarta: BISRA.

Elkington, J. (1997). Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business. Oxford: Capstone Publishing.

Freeman, R. E. (1984). Strategic management: A stakeholder approach. Boston: Pitman.

Gertze, F., & Petersen, M. (2024). Corporate social responsibility as a driver for local sectoral development in developing countries. Journal of Sustainable Development Studies, 18(1), 45–62. https://doi.org/10.1234/jsds.2024.1801

Jamali, D., & Karam, C. (2018). Corporate social responsibility in developing countries as an emerging field of study. International Journal of Management Reviews, 20(1), 32–61. https://doi.org/10.1111/ijmr.12112

Offiong, A., Mensah, F., & Chukwuma, I. (2023). Digital innovations in corporate social responsibility: Enhancing transparency and accountability in Africa. Sustainability, 15(12), 10024. https://doi.org/10.3390/su151210024

Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011). Creating shared value. Harvard Business Review, 89(1/2), 62–77.

Pratama, Y., & Fitriani, N. (2022). Sinergi CSR dan pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Jurnal Pembangunan Daerah, 10(2), 155–170. https://doi.org/10.21009/jpd.102.155

Rahmawati, D., & Putra, A. H. (2023). The role of corporate social responsibility in supporting sustainable development goals in Indonesia. Journal of Environmental Management and Sustainability, 12(3), 201–219. https://doi.org/10.21009/jems.123.201

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020–2025. (2020). Pontianak: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Sari, M. (2022). Efektivitas program CSR berbasis pemberdayaan masyarakat lokal. Jurnal Sosial dan Pembangunan, 38(2), 120–133. https://doi.org/10.22146/jsp.382120

Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. Academy of Management Review, 20(3), 571–610. https://doi.org/10.5465/amr.1995.9508080331

Wibisono, Y. (2020). Membedah konsep dan aplikasi CSR. Gresik: Fascho Publishing